



Jurnal BADATI

Vol 3 No 1 April 2021

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 13 - 19

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PROSES
PENGUATAN KAPASITAS PETANI DALAM TINJAUAN MASYARAKAT
PEDESAAN**

Samson Laurens

Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email : samsonlaurens27@gmail.com

Abstrak

Secara sosial, petani sebagai sebuah entitas sosial sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Key Word : Pemberdayaan Masyarakat, Petani, Masyarakat Pedesaan

PENDAHULUAN

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat.

Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah- masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya,

kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Secara sosial, petani sebagai sebuah entitas sosial sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai. Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi menjadi salah satu ganjalan bagi masyarakat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama saudaranya yang telah berhasil.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan Slamet (2003) bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self-determination*). Sulistiyani (2004) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat. Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua ini secara terus menerus menentukan

kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten, 1984). Paradigma pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Pemahaman akan paradigma itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mementingkan rakyat.

Proses pemberdayaan menekankan kepada proses pemberian atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, proses ini biasanya ditindak lanjuti dengan upaya membangun *asset material* guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi.

Memberdayakan rakyat berarti mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat *bargaining position* masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala sektor kehidupan, sedangkan pemberdayaan kelembagaan merujuk kepada kemampuan untuk menjadikan kelembagaan masyarakat untuk menjadi lembaga yang efektif, independen dan berkesinambungan dengan mengupayakan, 1) efektivitas, keterbukaan dan pertanggung jawaban, 2) otonomi dan sumber dana independen dan 3) jaringan kerja.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) hal; pertama, proses penyadaran sosial, upaya ini dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki potensi dan bahwa kemiskinan bukan disebabkan karena mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali, oleh karenanya proses penyadaran diarahkan kepada usaha mengembalikan kekuatan masyarakat untuk memperjuangkan kembalinya daya kemampuan mereka yang terampas; kedua, pengorganisasian masyarakat, pengorganisasian ini dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat dalam membentuk organisasi sebagai wadah untuk memperjuangkan kembalinya daya kemampuan mereka, hanya saja dalam hal ini organisasi yang terbentuk harus lahir dan tumbuh dari prakarsa mereka sendiri sebagai wujud jalinan kebersamaan yang akan mempertautkan mereka dalam kesadaran bersama untuk berbuat yang terbaik bagi mereka.

Pemberdayaan adalah upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Berdayanya masyarakat memungkinkan masyarakat tersebut bertahan dalam pengertian dinamis untuk mengembangkan diri guna mencapai kemajuan. Berdayanya masyarakat juga menjadi sumber dari ketahanan masyarakat. Memberdayakan masyarakat berarti berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum konsep pemberdayaan mengacu kepada upaya penciptaan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, upaya dalam hal ini bertitik tolak dari pandangan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan dapat digambarkan sebagai upaya untuk membangun potensi tersebut dengan mendorong, memotivasi atau membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumodiningrat (2011) menyimpulkan bahwa proses meningkatkan keberdayaan warga masyarakat melalui proses pemberdayaan yang terwujud dari modal sosial, modal manusia, modal fisik dan kemampuan pelaku. Hal ini akan dapat memberikan solusi yang lebih baik karena dapat menambah penjelasan bahwa proses pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan untuk mencapai keberdayaan masyarakat.

Dijelaskan pula bahwa ada dua pola untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Pola pertama, adalah ada dua konstruk sebagai antesedennya, yakni kemampuan pelaku pemberdayaan dan proses pemberdayaan. Temuan ini memberikan solusi bahwa peran kemampuan pelaku pemberdayaan akan efektif dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat jika masyarakat sebelumnya meningkatkan pemberdayaannya. Pelaku pemberdayaan tidak dapat langsung berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat, tetapi harus dimediasi dengan proses yang mengiringi pemberdayaan. Peningkatan pemberdayaan sebagai penentu keberhasilan pelaku dalam upaya peningkatan keberdayaan masyarakat. Pola kedua, adalah pola jalur bertahap yang dapat dilalui untuk pemberdayaan masyarakat. Peningkatan keberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui proses pemberdayaan karena adanya peran modal manusia dan modal fisik. Temuan ini memberikan solusi bahwa modal usaha yang meliputi modal fisik dan modal manusia tidak secara otomatis menghasilkan keberdayaan masyarakat. Pengembangan modal fisik akan menstimulasi pengembangan modal manusia yang akan mendukung proses pemberdayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan keberdayaannya, masyarakat tidak hanya cukup melakukan pengembangan modal fisik saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya sebagai syarat kesuksesan dalam melakukan pemberdayaan.

Dalam era reformasi ini, masyarakat harus mampu dan berani mengambil keputusan untuk melakukan usaha baru untuk masa depan.

Penelitian ini membuktikan bahwa modal manusia berperan memainkan perubahan sumber daya masyarakat untuk meraih kesuksesan proses pemberdayaan. Modal manusia ditandai adanya tingkat pendidikan yang memadai yang diperoleh dari dukungan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat mengembangkan pemberdayaannya dan akan berdampak secara signifikan pada kemandirian masyarakat.

Untuk dapat menyesuaikan di era reformasi ini, masyarakat harus dapat melakukan perubahan yang lebih kompetitif dengan melakukan peningkatan pendidikan dan keterampilannya untuk menjadi masyarakat yang tajam dalam menangkap peluang yang berorientasi pada masa depan.

Demikian pula hasil penelitian Fukuyama (1995) tentang hubungan kemampuan masyarakat dengan modal manusia (*human capital*) dan berimplikasi pada teori yang terkait dengan konsep yang dikembangkan

Romer (1990) dimana *human capital* sebagai *anteseden* proses pemberdayaan. Peningkatan keberdayaan masyarakat memerlukan satu paket secara koheren dari perubahan modal fisik yang dibangun berdasarkan kekuatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan kemampuan pelaku pemberdayaan dalam

Demikian pula hasil penelitian Syabra (2003) bahwa keterlibatan fasilitator sebagai pelaku pemberdayaan dalam mengawal proses pemberdayaan merupakan sumber penting sebagai jalur untuk meraih keberdayaan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Silkhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

Pemberdayaan masyarakat nelayan memiliki korelasi yang sangat positif dengan penanggulangan kemiskinan nelayan di Kabupaten Minahasa Selatan. (kawalur, 2010).

Salah satu aspek sosial yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat miskin adalah masih kuatnya ikatan *patron klien*. Sedangkan faktor yang mendukung proses pemberdayaan adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan sumber daya produktif serta kemudahan akses. (Rusli, 2008).

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Proses Penguatan Kapasitas Petani

Pemberdayaan masyarakat petani sebagai proses penguatan kapasitas petani dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil penelitian Karsidi (2007) yang mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat sebagai berikut:

1. Belajar Dari Masyarakat Petani

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.

2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat Petani sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang.

Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, pengetahuan modern dan inovasi dari luar malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

Referensi

- Fukuyama, 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press, ISBN 0-02-910976_0
- Hoy, W.K., and J. Ferguson, 1985. *A Theoretical Framework and Exploration of Organizational Effectiveness of Schools*. Educational Administration Quarterly, 21(2), 117-134.
- Karsidi, Ravik. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris Di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*. Jurnal Penyuluhan, September 2007, Vol. 3 No. 2
- Kawalur, Arie Frits. 2010. *Pemberdayaa Masyarakat Nelayan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 8 Nomor 1, Februari 2010.
- Korten, David C., 1980, *Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach*, Public Administration Review, September/October 1980 p.480509
- Pranarka dan Vidhyandika, 1996. *Pemberdayaan dalam Onny S.P dan AMW*. Pranarka (ed). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rusli, Zaili. 2008. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.8 No.2 Juli 2008. 111-121
- Sikhondze, Wilson B. 1999. *"The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland"*. Journal: Adult Education and Development No. 53/1999, Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn : 112/DW.

- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Sulistiyan, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumodiningrat, G. 2000. *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA
- _____. 2011 . *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011: 15-27
- Syabra, R. 2003. Modal Sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol.V. N0.1:1-5.